



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN

DIREKTORAT PRASARANA
PERKERETAAPIAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

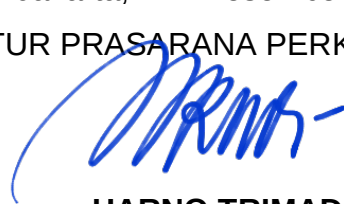
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2022 disusun sebagai tahun ketiga dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024, secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2022 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2022 disamping dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2022.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang.

Jakarta, Desember 2021

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

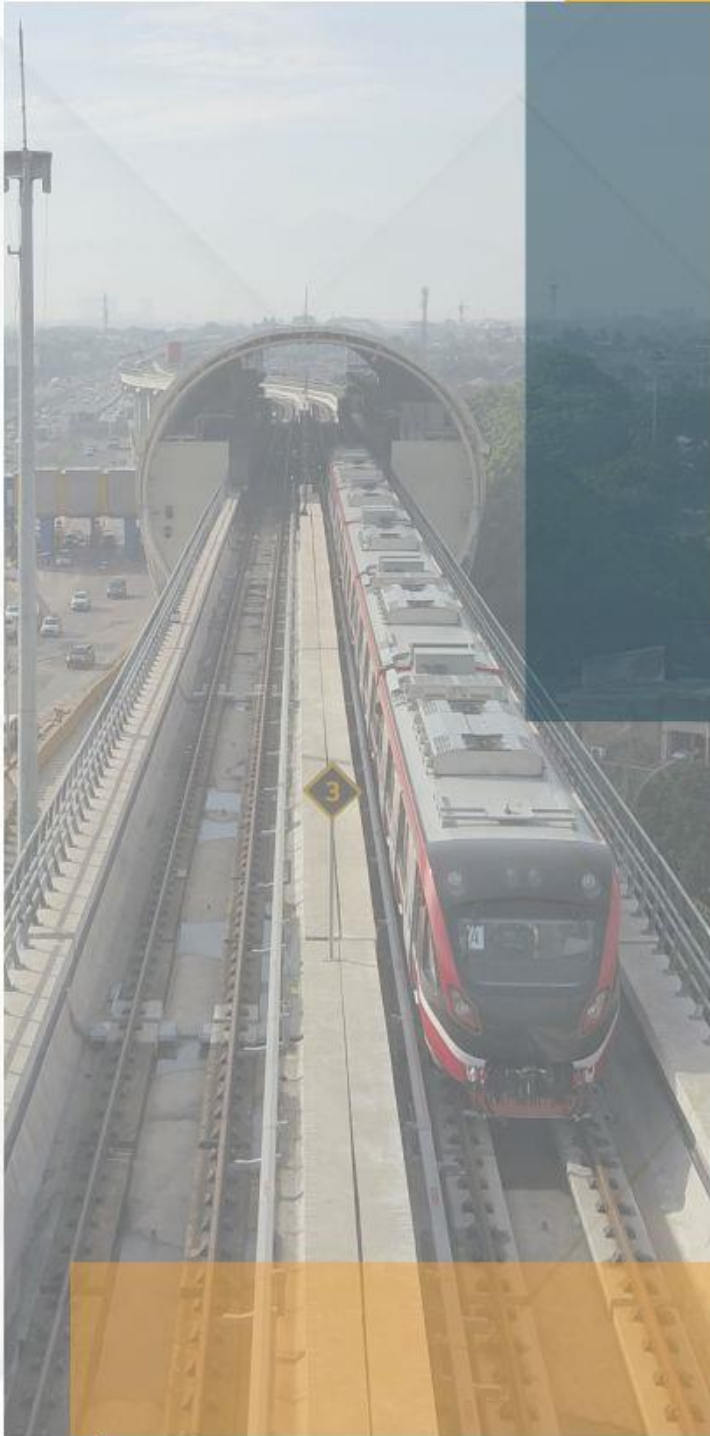


HARNO TRIMADI

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720723 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN	1
1.1 DASAR HUKUM	1
1.2 LATAR BELAKANG	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	3
RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	15
2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2024	15
2.2 KONSEP REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2024	16
CAPAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN.....	19
3.1 CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 – 2019.....	19
3.2 CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020 – 2021.....	19
3.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2021	20
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022	22
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2022	22
PENUTUP	24
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana dan perubahanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dan perubahanya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Dengan berpedoman pada Revisi Konsep Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020-2024 Bidang Prasarana Perkeretaapian, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2022 yang merumuskan indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2022.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2022 memuat tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2021 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2022 diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menetapkan rencana target pada indikator – indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang akan dicapai tahun 2022.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 Bidang Prasarana Perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan menjadi salah satu komponen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di setiap unit kerja dalam Lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 67 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang didalamnya terdapat unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara legalitas kedudukannya dibawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Rehabilitasi/perawatan prasarana perkeretaapian;
- b. Pembangunan prasarana perkeretaapian dan pendukung operasional kereta api;
- c. Pembinaan, monitoring evaluasi dan pemeriksaan kualitas prasarana perkeretaapian;
- d. Sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian;

- e. Standarisasi material, system, desain di bidang prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari :

1. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah 1 yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan

konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

2. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

3. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api.

4. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

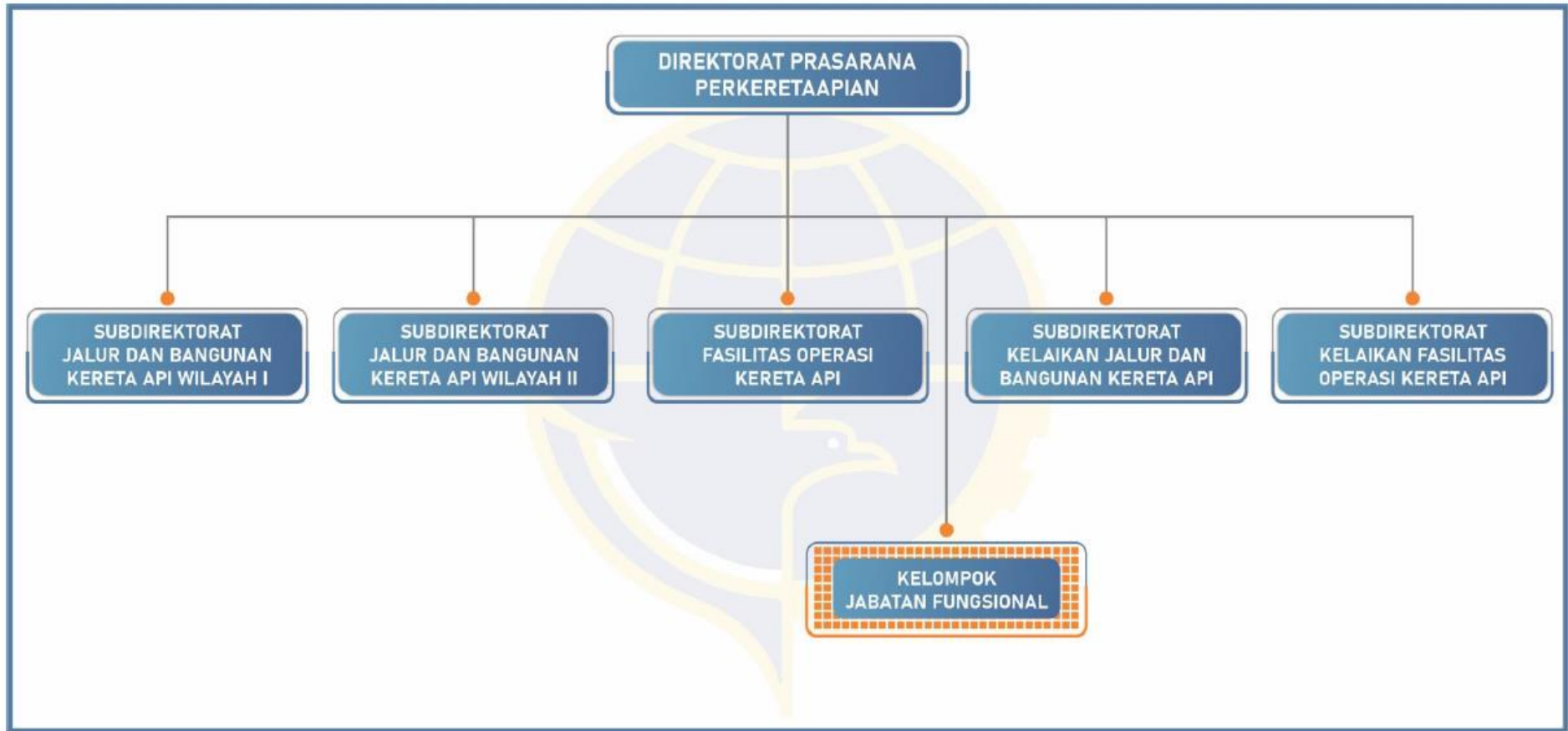
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api.

5. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api; dan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian



BAB II

RENCANA STRATEGIS 2020-2024



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2024

Perkembangan Pembangunan bidang transportasi perkeretaapian akan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, dan diharapkan dapat menjadi tulang punggung angkutan darat, maka kebijakan transportasi ke depan akan sangat berpengaruh terhadap prospek perekonomian nasional yang tentu akan terpengaruh oleh kelambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Rencana Strategis Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi program-program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sejalan dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional maupun internal Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 dengan penetapan Surat Keputusan Nomor : PR. 005/SK. 89/DJKA/2020. Sebagai tindaklanjut ditetapkannya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Prasarana telah Menyusun rencana strategis bidang prasarana perkeretaapian tahun 2020-2024.

Penyusunan indikator-indikator kinerja kegiatan Rencana Strategis Bidang Prasarana Perkeretaapian berdasarkan cascading sasaran program Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020-2024 dengan penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : HK. 209/1/9/DJKA/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Indiaktor Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi Yang Terhubung Jalur Kereta Api
2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung PELAYANAN Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI
		Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan Dan Telekomunikasi Perkeretaapian
		Jumlah Peningkatan Gardu Traksi Dan LAA Perkeretaapian
3	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
		Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
		Jumlah Rumusan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian
		Persentase Penetapan / Persetujuan / Perijinan Dibidang Prasarana Perkeretaapian Yang Tepat Waktu
4	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Penyerapan Anggaran
		Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Dari penetapan indikator kinerja kegiatan diatas maka disusunlah target rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 dengan target masing-masing indiaktor sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL
					2020	2021	2022	2023	2024	
SK P1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK P1	Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang terhubung Jalur KA	Lokasi	37	38	38	39	41	41
SK P2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK P2.1	Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	82,84	84,97	87,10	89,94	94	94
		IKK P2.2	Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	0	0	21	-	-	21
		IKK P2.3	Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian	Unit	0	0	4	-	-	4
SK P3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Km'sp	195	60	170	150	200	759
		IKK P3.2	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	150	150	180	200	215	895
		IKK P3.3	Jumlah Rumusan NSPK bidang	Dokumen	18	12	12	10	11	63

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL
					2020	2021	2022	2023	2024	
			Prasarana Perkeretaapian							
		IKK P3.4	Persentase Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
SK P4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK P4.1	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	1.428.728.000	1.739.440.000	1.913.3884.000	2.104.722.400	2.315.194.640	9.501.469.040
		IKK P4.2	Persentase Penyerapan Anggaran	%	94	100	100	100	100	100

Tabel 2.3
Perkiraan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024

No	Program/Kegiatan		2020 (Rp. Milyar)	2021 (Rp. Milyar)	2022 (Rp. Milyar)	2023 (Rp. Milyar)	2024 (Rp. Milyar)	Total (Rp. Milyar)
1	Program Infrastruktur Konektivitas		1.746,051	4.778,294	8.530,553	7.928,697	8.097,137	31.080,732
	a.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	627,265	2.872,694	4.261,745	5.975,712	6.097,913	19.835,329
	b.	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	271,700	518,300	614,204	-	-	1.404,204
	c.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	844,781	1.384,631	3.650,818	1.949,216	1.995,078	9.824,524
	d.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	2,305	2,670	3,785	3,769	4,146	16,674
2	Program Dukungan Manajemen		28,618	38,342	44,541	49,159	47,416	208,076
	a.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	28,618	38,342	44,541	49,159	47,416	208,076
Total Pagu 2020 - 2024			1.774,670	4.816,637	8.575,094	7.977,855	8.144,552	31.288,808

Pada tahun anggaran 2020, dampak dari pandemi Covid-19 terdapat kebijakan penghematan anggaran dilingkungan Kementerian Perhubungan. Khususnya pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan penghematan anggaran pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Pemotongan Anggaran Tahun 2020 Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Kode	SASARAN	PAGU ANGGARAN AWAL TAHUN 2020	PENGHEMATAN TAHUN 2020	PAGU 2020 SETELAH PENGHEMATAN
1968	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	4.969.960.731.000	3.195.261.053.000	1.774.699.678.000

2.2 KONSEP REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2024

Seiring pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran pada tahun 2021 Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome). Perubahan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/62/M.AA.05/2021 perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 dan hasil pembahasan sesuai dengan Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/8/4/K1/DJKA/2021 Tanggal 24 Mei 2021 Perihal Undangan Rapat Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/9/19/K1/DJKA/2021 tanggal 15 Juni 2021 Perihal Pembahasan Indikator Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta penetapan indikator kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : HK.209/2/6/DJKA/2021 Tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan rincian dan target sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK P1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	IKK P1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah
SK P2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung PELAYANAN Perkeretaapian	IKK P2.1	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai Dengan TQI Kategori I dan II
		IKK P2.2	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal
SK P3	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	Persentase Prasarana Perkeretaapian Yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan (Jalur, Bangunan, Fasilitas Operasi)
		IKK P3.2	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian
SK P4	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK P4.1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		IKK P4.2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Dari penetapan indikator kinerja kegiatan diatas maka disusunlah target rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020-2024 dengan target masing-masing indiaktor sebagai berikut :

Tabel 2.6
Konsep Revisi Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2020 - 2024

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					Total
					2020	2021	2022	2023	2024	
SK P1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK 1.1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,409	0,416	0,436	0,443	0,456	0,456
SK P2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK 2.1	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	82,83	84,97	87,10	89,94	94,00	94,00
		IKK 2.2	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	%	53,07	59,33	60,18	62,14	63,30	62,92
SK P3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK 3.1	Persentase Prasarana Perkeretaapian yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan (Jalur, Bangunan, Fasilitas Operasi)	%	69,59	77,39	84,23	92,00	100,00	100,00
		IKK 3.2	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	54,17	66,67	73,61	83,33	100,00	100,00
SK P4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK P4.1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	94,00	99,00	99,80	100,00	100,00	100,00
		IKK P4.2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



BAB III

CAPAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN



CAPAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

3.1 CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 – 2019

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan dan peningkatan kapasitas perketaapian selama tahun 2015 – 2019 telah dilakukan pembangunan perkeretaapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 1.025,62 Km, peningkatan / rehabilitasi jalur kereta api guna meningkatkan kondisi/ keandalannya sepanjang 717,57 Km, pembangunan stasiun dan bangunan lain sebanyak 77 unit dan peningkatan/pembangunan fasilitas operasi sebanyak 58 unit dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Pembangunan Prasarana Perkeretaapian 2015 – 2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Pembangunan Jalur KA termasuk Jalur Ganda dan Reaktivasi	Km'sp	89,91	94,82	188,56	370,76	281,56	1.025,62
Peningkatan dan Perawatan/ Rehabilitasi Jalur KA	Km	333,6	39	8,28	228,99	107,7	717,57
Pembangunan Stasiun / Bangunan Operasional Kereta Api	Unit	6	1	5	38	25	77
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi	Unit	23	3	9	5	18	58

3.2 CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020 – 2021

Pada periode tahun 2020 – 2021, telah dilakukan pembangunan perkeretaapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 134,118 Km, peningkatan / rehabilitasi jalur kereta api guna

meningkatkan kondisi/ keandalannya sepanjang 707,41 Km, pembangunan stasiun dan bangunan lain sebanyak 17 unit dan Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi sebanyak 46 unit dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Pembangunan Prasarana Perkeretaapian 2020 – 2021

URAIAN	SATUAN	2020	2021	TOTAL
Pembangunan Jalur KA termasuk Jalur Ganda dan Reaktivasi	Km'sp	104,218	43,14	147,36
Peningkatan dan Perawatan/ Rehabilitasi Jalur KA	Km	607,790	424,322	1.032,11
Pembangunan Stasiun / Bangunan Operasional Kereta Api	Unit	14	3	17
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi	Unit	36	10	46

3.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2021

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada periode tahun 2020 – 2021, capaian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk tahun 2020 dan tahun 2021 dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2021

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
					2020	2021	2020	2021
SK P1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK 1.1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,409	0,416	0,409	0,416
SK P2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK 2.1	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	82,83	84,97	82,83	84,97
		IKK 2.2	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	%	57,67	59,33	59,67	59,33
SK P3	Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK 3.1	Persentase Prasarana Perkeretaapian yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan (Jalur, Bangunan, Fasilitas Operasi)	%	69,59	77,39	69,59	77,39
		IKK 3.2	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	54,17	66,67	54,17	66,67
SK P4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK P4.1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	94,00	99,00	99,74	99,00
		IKK P4.2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100,00	105,72	198,66



BAB IV

RENCANA KINERJA

TAHUN 2022



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2022

Kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Adapun tugas dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian Rencana Target Kinerja dan Anggaran untuk Tahun 2022 :

Tabel 4.1
Target dan Pendanaan Sasaran Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian
* dalam ribu rupiah

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		VOL	BIAYA*
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,436	381.512.950.000
JUMLAH			381.512.950.000

Tabel 4.2
Target dan Pendanaan Sasaran Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian
* dalam ribu rupiah

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		VOL	BIAYA*
Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	87,10	-
Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	%	60,18	405.065.016.000
JUMLAH			405.065.016.000

Tabel 4.3
Target dan Pendanaan Sasaran Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian

* dalam ribu rupiah

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		VOL	BIAYA*
Persentase Prasarana Perkeretaapian yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan (Jalur, Bangunan, Fasilitas Operasi)	%	84,23	662.664.790.000
Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	73,61	1.073.236.000
JUMLAH			663.738.026.000

Tabel 4.4
Target Fisik dan Pendanaan Sasaran Terwujudnya GOOD GOVERNANCE Dan CLEAN GOVERNMENT Di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

* dalam ribu rupiah

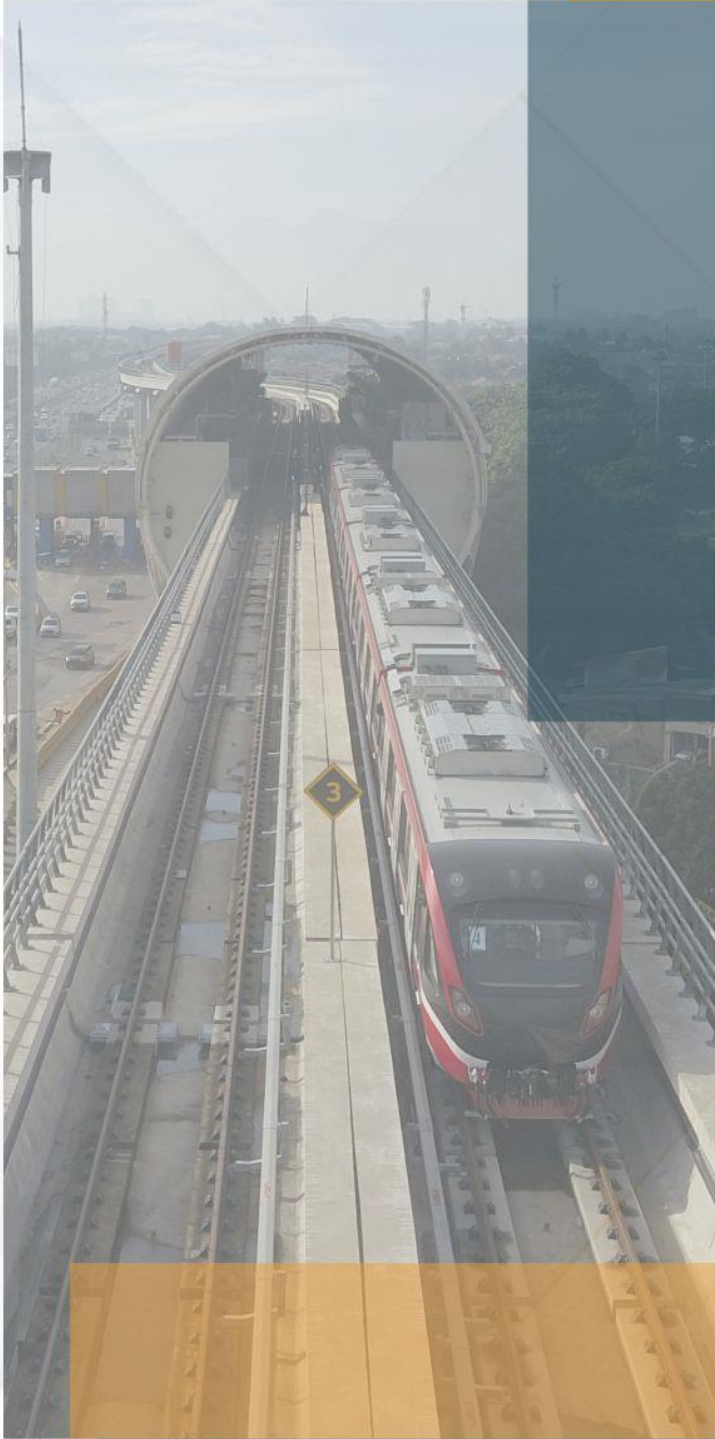
SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		VOL	BIAYA*
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	90,80	41.649.444.000
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	100	-
JUMLAH			41.649.444.000

Detail target kegiatan dan anggaran secara lengkap permasing-masing indikator kinerja kegiatan terdapat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2022.

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2022 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tersebut dapat direview dan dilakukan penyesuaian.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan dibidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.



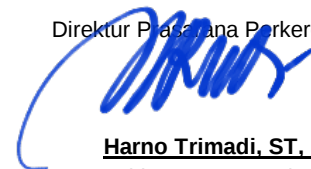
LAMPIRAN

LAMPIRAN A
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK P1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapain	IKK P1	IKK 1.1 RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Rasio	0,436
SK P2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK P2.1	IKK 2.1 PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI KATEGORI I DAN II	%	87,10
		IKK P2.2	IKK 2.2 PERSENTASE FASILITAS OPERASI KERETA API DENGAN TEKNOLOGI HANDAL	%	60,18
SK P3	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	IKK 3.1 PERSENTASE PRASARANA PERKERETAAPIAN YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI KELAIKAN (JALUR, BANGUNAN, FASILITAS OPERASI)	%	84,23
		IKK P3.2	IKK3.2 PERSENTASE PEMENUHAN NSPK BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN	%	73,61
SK P4	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK P4.1	IKK P4.1 PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DIT. PRASARANA	%	99,98
		IKK P4.2	IKK P4.2 PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	%	100,00

Jakarta, Desember 2021

Direktur Prasarana Perkeretaapian



Harno Trimadi, ST, MT

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720723 199803 1 004

LAMPIRAN B
RINCIAN KEGIATAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN							
IKK 1.1 RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH		0,436	Rasio			381.512.950.000	
1	Rasio Konektovitas Antar Wilayah I: - PKN/PKW/Simpul Transportasi yang telah terhubung Jalur KA Wilayah I: Serang, Cilegon, Jabodetabek, Rangkasbitung, Cikampek-Cikopo, Cirebon, Bandung Raya, Sukabumi, Indramayu, Tasikmalaya, Kedungsepur, Cilacap, Surakarta, tegal, Pekalongan, Cepu, Purwokerto, Kebumen, Klaten, Yogyakarta, Sleman, Malang, Gerbangkertosusila, Bojonegoro, madiun, jember, banyuwangi, probolinggo, blitar, pasuruan, tulungagung, kediri, Barru, pel. Merak, Pel. Tanjung Priok, Pel. Cilacap, Bandara Soetta, Bandara Adi Sumarmo, Bandara Kulon Progo - PKW/Simpul Transportasi yang akan terhubung Jalur KA Tahun 2022: Pelabuhan Garongkong, Pangkajene, Mamminasata	0,394	Rasio				Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah I
2	Rasio Konektivitas Antar Wilayah II: - Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang telah terhubung Jalur KA Wilayah II: Mebidangro,rantauprapat,pmatangsiantar,tebingtinggi,kisaran, Perkotaan Padang-Lubuk Agung-Pariaman, pariaman, patungraya Agung, Bandar lampung, Lubuk Linggau, Muara enim, Baturaja, Prabumulih, Lahat, Kota Bumi, Pel. Belawan, Pel.Kuala Tanjung, Pel. Teluk Bayur, Pel. Tarahan, Bandara Kualanamu, Bandara Minangkabau, Bandara SM Badarudin	0,550	Rasio				Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah II
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS							
1	DED Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api Lintas Tegal Pekalongan dan Tegal - Purwokerto	1	Dokumen			2.392.826.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
2	DED Shifting Frekuensi Microwave dan Peningkatan Digitalisasi Komunikasi Radio Traindispatching Kereta Api	1	Dokumen			2.197.090.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
3	DED Penanganan Daerah Rawan Longsor Lintas Lahat-Lubuk Linggau	1	Dokumen			3.219.472.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
4	DED Pembangunan Underpass Bukit Duri JPL 14	1	Dokumen			1.854.081.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
5	DED Pembangunan Jembatan dan Stasiun antara Naras-Sungai Limau	1	Dokumen			2.679.031.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
6	DED Stasiun lintas Medan-Binjai	1	Dokumen			1.841.615.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
7	DED Jembatan dan Utilitas Pendukung Jalur Kereta Api Lintas Perlanaan-Kisaran-Rantau Prapat	1	Dokumen			2.858.672.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
8	DED Penanganan Rob pada Jalur Kereta Api antara Labuan-Belawan lintas Medan-Belawan	1	Dokumen			2.203.695.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
9	Reviu DED Pembangunan Jalur KA antara Bojong Tengah-Patimban (Re-alinyemen) lintas Pegaden BaruPelabuhan Patimban	1	Dokumen			1.970.554.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
10	DED Pembangunan Depo Pulo Brayan termasuk Persinyalan dan Telekomunikasi	1	Dokumen			2.123.233.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
11	DED Pengembangan Stasiun Pelabuhan Untuk Mendukung KIT Batang	1	Dokumen			2.188.000.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
12	DED Pembangunan Depo Kereta Api untuk Mendukung Elektrifikasi Jalur KA antara Padalarang-Cicalengka	1	Dokumen			2.079.851.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
JUMLAH		12	Dokumen			27.608.120.000	
PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN DAN STUDI PENDUKUNG LAINNYA DI BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN							
1	Jasa Konsultan Pembangunan Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek	1	Dokumen			100.000.000.000	PPK Urban Transport
2	Tunggakan atas Penyelesaian Pembayaran Pekerjaan Supervisi Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jaka			19.563.272.000	Rupiah	19.563.272.000	PPK Urban Transport
3	Proyek Manajemen Unit PMU Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	1	Dokumen			15.000.000.000	PPK Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) & MRT
4	Pengembangan Aplikasi Perizinan Perpotongan dan Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain Berbasis Teknologi Informasi	1	Dokumen			1.102.530.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
5	Pembangunan Aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	1	Dokumen			1.160.280.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
6	Pemetaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Kelaikan Fasilitas Operasi	1	Dokumen			1.376.265.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
7	Studi Penyusunan Tata Cara Pengujian Persinyalan Sistem Otomatisasi	1	Dokumen			1.853.293.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
8	Master Data Jalan Rel Kereta Api dengan Memanfaatkan Teknologi Informatika	1	Dokumen			2.679.031.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
9	Master Data pada Jembatan Kereta Api untuk Analisa Tingkat Pelayanan Multi Skala	1	Dokumen			2.500.000.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
JUMLAH		8	Dokumen			145.234.671.000	
PENGADAAN WESEL							
1	Pengadaan Wesel R 54 untuk Wilayah Sumatera			-	Unit	0	PPK Perawatan
2	Pengadaan Wesel R 54 untuk Wilayah Jawa			97	Unit	131.049.538.000	PPK Perawatan
JUMLAH				97	Unit	131.049.538.000	
	Kegiatan Sewa Lahan	40.000	M2				PPK Perawatan
a	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Jawa Bagian Tengah	10.000	M2			911.375.000	PPK Perawatan
b	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Sumatera Selatan	10.000	M2			537.625.000	PPK Perawatan
c	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Kawasan Industri Medan Tahap III Block D	20.000	M2			777.975.000	PPK Perawatan
JUMLAH		40.000	M2			2.226.975.000	
JUMLAH PENGADAAN WESEL dan SEWA LAHAN						133.276.513.000	

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
PENYUSUNAN DESAIN/STD							
1	Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	11	Dokumen			72.940.000.000	PPK Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) & MRT
2	Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East West Line Project Phase I Stage II	1	Dokumen			200.000.000	PPK Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) & MRT
JUMLAH		0,94	Lokasi			73.140.000.000	
BIMBINGAN TEKNIS JALUR DAN BANGUNAN KERETA API							
1	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	2	Laporan			383.459.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
2	Bimbingan Teknis, serta Koordinasi Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	2	Laporan			428.903.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II
JUMLAH		5,00	Laporan			812.362.000	
PEMANTAUAN DAN EVALUASI JALUR DAN BANGUNAN KERETA API							
1	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	12	Laporan			1.000.193.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
2	Monitoring dan Evaluasi Jalur dan Bangunan KA Wilayah II	12	Laporan			441.091.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II
JUMLAH		24	Laporan			1.441.284.000	
PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN							
IKK 2.1 PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI KATEGORI I DAN II		87,10	%			-	
1	Kondisi Jalur Kereta Api yang sesuai Track Quality Index (TQI) dengan Kecepatan Minimum 80 Km/Jam	87,10	%			-	PPK IMO KAI, Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
JUMLAH		87,10	%			-	
IKK 2.2 PERSENTASE FASILITAS OPERASI KERETA API DENGAN TEKNOLOGI HANDAL		60,18	%			405.065.016.000	
1	Jumlah Persinyalan Elektrik Wilayah Jawa dan Sumatera	356	Unit				Kasubdit Fasilitas Operasi KA
2	Jumlah Persinyalan Mekanik Wilayah Jawa dan Sumatera	254	Unit				
JUMLAH		610	Unit				
3	Pembangunan dan Peningkatan Persinyalan (Peningkatan Fasilitas Operasi Jabodebek 8 Unit, Pembangunan Fasilitas Operasi Bogor - Cicurug 4 Unit, Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap I Segmen Gedebage - Haurpugur 3 Unit, Pembangunan Sinyal dan Telekomunikasi antara Mandalai - Palanro Lintas Makassar - Parepare 8 Unit, Pembangunan Sinyal dan Telekomunikasi LRT Jabodebek 18 Unit)	43	Unit				
JUMLAH		43	Unit				

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
PENINGKATAN PERSINYALAN							
1	Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara-Bogor-dan Manggarai-Jakarta Kota (MYC 2020-2022) (Penambahan Interlocking Centerline: Jayakarta, Gambir, Bogorline: Pasar Minggu, UI, Depok Baru, Citayam, Bojong Gede, Cilebut)	8	Unit			317.018.254.000	PPK Peningkatan FASOP KA Jabodebek
2	Supervisi Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta kota (MYC 2020-2022)	1	Laporan			11.825.000.000	PPK Peningkatan FASOP KA Jabodebek
JUMLAH		8	Unit	-	-	328.843.254.000	
1	Peningkatan Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta kota (MYC 2020-2022) (Penambahan Gardu Traksi di Stasiun Karet, Duren Kalibata, Sawah Besar)	3	Unit			75.360.800.000	PPK Peningkatan FASOP KA Jabodebek
JUMLAH		3	Unit			75.360.800.000	
BIMBINGAN TEKNIS FASILITAS OPERASI KERETA API							
1	Bimbingan Teknis Fasilitas Operasi Kereta Api (Persinyalan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	2	Laporan			467.442.000	Kasubdit Fasilitas Operasi KA
JUMLAH			Laporan			467.442.000	
PEMANTAUAN DAN EVALUASI FASILITAS OPERASI KERETA API							
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Prasarana Fasilitas Operasi Kereta Api (Persinyalan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	12	Laporan			393.520.000	Kasubdit Fasilitas Operasi KA
JUMLAH			Laporan			393.520.000	
IKK 3.1 PERSENTASE PRASARANA PERKERETAAPIAN YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI KELAIKAN (JALUR, BANGUNAN, FASILITAS OPERASI)							
		84,23	%			662.664.790.000	
a.	Baseline Jumlah Sertifikat Prasarana Perkeretaapian			1.831			
1	Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api			1.136	Sertifikat		Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api			695	Sertifikat		Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
b	Jumlah Sertifikat yang ditargetkan akan selesai tahun 2022			180			
1	Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api	89,05	%	60	Sertifikat	481.627.000	Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api	78,21	%	120	Sertifikat	442.609.000	Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
JUMLAH		84,23	%	2.156	Sertifikat	924.236.000	

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
BIMBINGAN TEKNIS KELAIKAN JALUR DAN BANGUNAN KERETA API							
1	Bimbingan Teknis Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api	2	Laporan			434.042.000	Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
JUMLAH		2	Laporan			434.042.000	
BIMBINGAN TEKNIS KELAIKAN FASILITAS OPERASI KERETA API							
1	Bimbingan dan Koordinasi Teknis Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	2				511.894.000	Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
JUMLAH		2	Laporan			511.894.000	
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN							
PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/REHABILITASI JALUR, JEMBATAN, STASIUN DAN FASILITAS OPERASI KERETA API							
1	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara IMO	5.634	Km'sp			500.000.000.000	PPK IMO KAI
2	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DAOP 9 Jember	1	Dokumen			2.438.510.000	PPK Perawatan
3	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DAOP 5 Purwokerto	1	Dokumen			2.092.450.000	PPK Perawatan
4	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DAOP 6 Yogyakarta	1	Dokumen			2.137.850.000	PPK Perawatan
5	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DAOP 7 Madiun	1	Dokumen			2.214.160.000	PPK Perawatan
6	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DAOP 8 Surabaya	1	Dokumen			2.452.140.000	PPK Perawatan
7	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DIVRE I Sumatera Utara	1	Dokumen			2.218.640.000	PPK Perawatan
8	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DIVRE II Sumatera Barat	1	Dokumen			1.978.100.000	PPK Perawatan
9	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DIVRE III Palembang	1	Dokumen			2.242.220.000	PPK Perawatan
10	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DIVRE IV Tanjung Karang	1	Dokumen			2.130.940.000	PPK Perawatan
11	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DAOP 1 DKI Jakarta dan Banten	1	Dokumen			3.466.800.000	PPK Perawatan

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
12	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DAOP 2 Bandung	1	Dokumen			2.217.360.000	PPK Perawatan
13	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DAOP 3 Cirebon	1	Dokumen			2.095.900.000	PPK Perawatan
14	Jasa Konsultansi Pelaksanaan IMO di wilayah DAOP 4 Semarang	1	Dokumen			2.166.130.000	PPK Perawatan
15	Penanganan Daerah Rawan/ Rintang Jalan	4	Titik			33.126.659.000	PPK Perawatan
16	Pembangunan Jembatan BH 1120 KM 305+5/6 Jalur Hulu Termasuk Perbaikan Hidrolika Sungai Antara Linggapura - Bumiayu Lintas Cirebon Kroya Tahun Anggaran 2021 - 2022	1	Unit			55.945.692.000	PPK Perawatan
17	Supervisi Pembangunan Jembatan BH 1120 KM 305+5/6 Jalur Hulu Termasuk Perbaikan Hidrolika Sungai Antara Linggapura - Bumiayu Lintas Cirebon Kroya Tahun Anggaran 2021 - 2022	1	Dokumen			1.574.217.000	PPK Perawatan
18	Perbaikan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera	223	Titik			29.560.238.000	PPK Perawatan
19	Pengadaan dan Pemasangan SHMS untuk LRT Sumatera Selatan	1	Unit			10.736.612.000	PPK Perawatan
JUMLAH		5.634	Km'sp			660.794.618.000	
JUMLAH PERAWATAN / REHABILITASI FASILITAS OPERASI KERETA API							
1	Jumlah Fasilitas Operasi KA yang Dirawat Oleh PT KAI	170	Km'sp				PPK IMO KAI
JUMLAH		170	Km'sp			-	
JUMLAH PERAWATAN / REHABILITASI JEMBATAN KERETA API							
1	Jumlah Jembatan KA yang Dirawat Oleh PT KAI	400	Unit				PPK IMO KAI
JUMLAH		400	Unit			-	
JUMLAH PERAWATAN / REHABILITASI STASIUN KERETA API							
1	Perawatan Stasiun Milik Pemerintah	31	Stasiun				PPK IMO KAI
JUMLAH		31	Stasiun			-	
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI IM dan IO PT KERETA API INDONESIA							
1	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai IM			175.776.019.503	Rupiah		PPK IMO KAI
2	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai IO			-	Rupiah		PPK IMO KAI
JUMLAH		-	-				

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
IKK3.2 PERSENTASE PEMENUHAN NSPK BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN		73,61	%			1.073.236.000	
1	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2022	5	Dokumen			652.905.000	
	Baseline Jumlah NSPK yang telah di Tetapkan s.d Tahun 2021	48					
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Subdit 1	1	Dokumen		66,67		Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah I
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Subdit 2	1	Dokumen		66,67		Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah II
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Subdit 3		Dokumen		50,00		Kasubdit Fasilitas Operasi KA
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Subdit 4	2	Dokumen		36,36		Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Subdit 5	1	Dokumen		20		Kasubdit Kelaikan Fasilitas operasi KA
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Organisasi dan Tata Kerja	6	Dokumen			420.331.000	Kasubbag TU
JUMLAH		11	Dokumen			1.073.236.000	
PERSENTASE PENETAPAN / PERSETUJUAN / PERIJINAN DIBIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN YANG TEPAT WAKTU							
1	Persentase Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain dan ijin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	100	%				Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II Kasubdit Fasilitas Operasi KA Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
a	Persentase Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I dan ijin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian		Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
b	Persentase Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II dan ijin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian		Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II
c	Persentase Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan / Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan LainSubdit Fasilitas Operasi Kereta Api dan ijin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian		Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdit Fasilitas Operasi KA
d	Persentase Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan LainSubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api dan ijin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian		Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
e	Persentase Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdit Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api dan ijin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian		Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdti Kelaikan Fasilitas Operasi KA
JUMLAH		0	%			-	

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
IKK P4.2 PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN		100	%				
1	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan & Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	6.913.384.000	Rupiah				- Bendahara Penerimaan
JUMLAH		6.913.384.000	Rupiah			-	
IKK P4.1 PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DIT. PRASARANA		99,98	%			41.649.444.000	
1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Satker PPPKA	99,98	%				Kuasa Pengguna Anggaran, PPK Kegiatan Rutin, PPK Perawatan, PPK IMO KAI, PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA, PPK Urban Transport, PPK PHLN & MRT, PPK Peningkatan Fasop KA
	Target Penyerapan Anggaran	99,98	%				
	Target Fisik	100	%				
2	Rapat Evaluasi Hasil Kinerja Satker Prasarana bersama Direktorat	1	Laporan			175.000.000	PPK Kegiatan Rutin, Kasubbag TU
3	Rakornis Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1	Laporan			759.865.000	PPK Kegiatan Rutin, Kasubbag TU
4	Layanan Perkantoran : (Kantor LRT Sumsel, Kantor IMO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas, Subag TU, Kantor LRT Jabodebek, Kantor Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, MRT East West, PPK Peningkatan Fasop KA Jabodetabek)	1	Laporan			24.160.663.000	PPK LRT Sumsel, PPK IMO, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Pembangunan LRT Jabodebek, PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, PPK MRT East West, PPK Peningkatan Fasop KA Jabodetabek dan Kasubbag TU
a	Layanan Perkantoran (Kantor LRT Sumsel)					1.193.778.000	PPK Urban Transport
b	Layanan Perkantoran (Kantor IMO)					5.207.427.000	PPK IMO KAI
c	Layanan Perkantoran (Kantor Perawatan)					3.362.080.000	PPK Perawatan
d	Layanan Perkantoran (Kantor Fasilitas)					5.884.974.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
e	Layanan Perkantoran (Subag TU)					641.448.000	Kasubbag TU
f	Layanan Perkantoran (Kantor LRT Jabodebek)					2.027.504.000	PPK Urban Transport
g	Layanan Perkantoran (Kantor Pengadaan Tanah LRT Jabodebek)					355.450.000	PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek
h	Layanan Perkantoran (Kantor MRT East West)					2.787.208.000	PPK PHLN & MRT
i	Layanan Perkantoran (Kantor Peningkatan Fasop KA)					2.700.794.000	PPK Peningkatan Fasop KA

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
5	Layanan Internal : Fasilitas Perkantoran (Kantor Pembangunan LRT Jabodebek, Kantor IMO, Kantor Fasilitas dan Kantor Perawatan, Kantor MRT East West dan Subbag Tata Usaha)	1	Laporan			574.425.000	PPK Urban Transport & PHLN; PPK IMO KAI; PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA; PPK Perawatan; PPK PHLN & MRT; Kasubbag TU; PPK Peningkatan Fasop KA
a	Fasilitas Perkantoran						
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Pembangunan LRT Jabodebek					20.000.000	PPK Urban Transport & PHLN
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran IMO					34.425.000	PPK IMO KAI
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Fasilitas					100.000.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Perawatan					20.000.000	PPK Perawatan
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran MRT East West					100.000.000	PPK PHLN & MRT
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Subbag TU					200.000.000	Kasubbag TU
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Peningkatan Fasop KA					100.000.000	PPK Peningkatan Fasop KA
6	Layanan Dukungan Manajemen Satker : a. Administrasi Kegiatan Pelelangan b. Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Peningkatan Fasop KA, Kantor LRT Sumsel, Kantor IMO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas, Kantor Pembangunan LRT Jabodebek dan kantor MRT East West), c. Sistem Akuntansi Instansi	2	Laporan/Dokumen			14.448.276.000	PPK LRT Sumsel, PPK IMO, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Pembangunan LRT Jabodebek, PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, PPK MRT East West, PPK Peningkatan Fasop KA Jabodetabekdan Kasubbag TU
a	Administrasi Kegiatan Pelelangan					872.210.000	
	Administrasi Kegiatan Pelelangan (Kantor IMO)					86.070.000	PPK IMO KAI, Kasubbag TU
	Administrasi Kegiatan Pelelangan (Fasilitas)					277.980.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA, Kasubbag TU
	Administrasi Kegiatan Pelelangan (Kantor Pembangunan LRT Jabodebek)					21.040.000	PPK Urban Transport, Kasubbag TU
	Administrasi Kegiatan Pelelangan (Perawatan)					145.470.000	PPK Perawatan, Kasubbag TU
	Administrasi Kegiatan Pelelangan (MRT East west)					191.620.000	PPK PHLN & MRT
	Administrasi Kegiatan Pelelangan (LRT Sumatera Selatan)					13.200.000	PPK Urban Transport, Kasubbag TU
	Administrasi Kegiatan Pelelangan (Kantor Peningkatan Fasop KA)					136.830.000	PPK Peningkatan Fasop KA

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
b	Administrasi Kegiatan Lainnya					12.658.674.000	
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor LRT Sumsel)					1.181.330.000	PPK Urban Transport
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor IMO)					2.127.400.000	PPK IMO KAI
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Perawatan)					1.578.471.000	PPK Perawatan
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Fasilitas)					2.080.902.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA, Kasubbag TU
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Pembangunan LRT Jabodebek)					822.440.000	PPK Urban Transport
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor MRT East West)					2.986.097.000	PPK PHLN & MRT
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Peningkatan Fasop KA)					1.882.034.000	PPK Peningkatan FASOPKA Jabodetabek
c	Sistem Akuntansi Instansi					917.392.000	PPK Perencanaan Teknis & Pengawasan Prasarana KA, Kasubbag TU
7	Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Penyusunan, Pelaporan Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021	10	Dokumen			410.383.000	Kasubbag TU
8	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1	Laporan			1.120.832.000	Kasubbag TU
JUMLAH		1.390.432.068.521	Dokumen/Laporan			41.649.444.000	
Anggaran Tahun 2022 Kegiatan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api						Rp	1.491.965.436.000